
MODEL KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN KONFLIK GEOTERMAL DI KABUPATEN SERANG

Ail Muldi

*Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
ail.muldi@untirta.ac.id*

Kata kunci :

Perbedaan Persepsi,
Komunikasi
Defensif,
Komunikasi
Konfrontatif, Konflik
Geothermal

Abstrak

Konflik geothermal di kabupaten Serang terjadi karena pendekatan komunikasi yang tidak tepat dilakukan antara pihak perusahaan dengan masyarakat lokal yang terdampak. Peta konflik geothermal melibatkan pihak perusahaan pemilik izin eksplorasi geothermal, pemerintah daerah setempat dan masyarakat lokal yang tinggal di kecamatan-kecamatan sekitar Gunung Praksak - Padarincang yang menjadi lokasi geothermal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Konflik proyek geothermal dilihat dari karakteristiknya merupakan konflik lingkungan. Komunikasi pihak perusahaan yang tertutup melahirkan kesenjangan informasi yang berdampak kepada terciptanya perbedaan persepsi dengan masyarakat lokal tentang kepentingan pembangunan geothermal di Kabupaten Serang. Kesenjangan persepsi di antara keduanya mendasari lahirnya konflik lingkungan yang bersifat vertikal dan telah masuk pada tahap puncak konflik. Komunikasi di antara pihak-pihak yang berkonflik bersifat defensif dan konfrontatif serta mengarah pada kekerasan. Konflik geothermal yang saat ini masih terjadi diduga berpotensi kekerasan yang merugikan kedua belah pihak.

Keywords :

*Different Perception,
Defensive
Communicative,
Confrontational
Communication,
Geothermal Conflict*

Abstract

Geothermal conflict in Serang Regency is occurred because communication approach is inappropriately done between the company part and local affected community. Geothermal conflict map involves the company geothermal exploration permit holder, regional government, and local community who live in districts around Mount Praksak - Padarincang, becoming a geothermal location. The research was carried out using qualitative method with study case approach. Conflict of geothermal project seen from its characteristic is environmental conflict. Sealed communication of the company made an information gap impact to the creation of different perception with local community about the interest of geothermal construction in Serang regency. Perception gap between both parts underlied the vertical conflict of geothermal environment and came to the peak stage of conflict. Communication between both conflict parts is defensive and confrontational, also tending to violence. Geothermal conflict that nowadays happen surmised will be potential for violence that disserving both parts.

PENDAHULUAN

Konflik sumber daya alam antara negara, perusahaan dan masyarakat belakangan banyak terjadi di Indonesia karena dipicu banyaknya kegiatan perluasan proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia. Salah satu yang menyita perhatian publik yaitu proyek geotermal pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pembangunan proyek PLTB dinilai merugikan masyarakat karena berdampak kepada sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Akibatnya masyarakat Kabupaten Serang menolak proyek tersebut sejak tahun 2013 dalam bentuk damai sampai dengan tindakan anarkis.

Keterlibatan konflik masyarakat terdampak kegiatan pembangunan PLTB di Kabupaten Serang banyak disebabkan pada persoalan pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber penghidupan yang terdesak dengan persoalan ekonomi. Pembangunan sistem energi geotermal (panas bumi) di Kabupaten Serang telah sampai pada konflik dalam bentuk kekerasan antara pemerintah daerah, pihak perusahaan dan masyarakat sekitar. Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sipil

yang bergerak di bidang lingkungan kemasyarakatan membuat konflik semakin rumit dan kompleks karena melibatkan banyak pihak dan lembaga terkait. Sejalan dengan penelitian World Bank tentang *post conflict* (2004-2012) di Indonesia menunjukkan terjadi peningkatan konflik sumber daya alam yang selaras dengan konflik kekerasan.

Pengelolaan sumber daya alam secara keberlanjutan seharusnya menitikberatkan kepada pendekatan partisipasi melalui pelibatan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat dan meminimalkan konflik. (Marques *et al.* 2011). Melibatkan institusi tradisional-lokal dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk keberlanjutan sumber daya alam yang tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan pencapaian sosial dan ekonomi masyarakat (Mowo *et al.* 2013). Institusi tradisional-lokal lebih efisien mendorong keberlanjutan dari pada kebijakan formal dan aturan hukum (Dixon dan Wood 2007). Desentralisasi menjadi peluang penguatan institusi tradisional-lokal dan penguatan pembangunan di tingkat lokal (Maconachie *et al.* 2008).

Pengelolaan sumber daya alam melibatkan pemuka pendapat lokal sebagai pemimpin institusi lokal yang berpengaruh, memiliki otoritas lokal, memahami relasi sosial dan telah mengakar kuat di masyarakat. Pemuka pendapat menjadi preferensi tindakan dalam penyelesaian konflik dari yang bersifat keluarga sampai dengan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya (Mowo *et al.* 2013). Sejalan dengan logika desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yakni pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kebutuhan daerah sehingga kewenangan pemerintah daerah yang otonom menjadi kekuatan untuk merespon aspirasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam menekankan demokratisasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan. Desentralisasi menuntut pendekatan pemerintahan daerah yang interaktif dengan kebutuhan daerah dan aspirasi lokal. Model interaktif bersifat dialogis, manusiawi dan sesuai dengan iklim masyarakat yang berciri demokratis (Sumardjo 2006).

Dari sudut pandang psikologis, konflik merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau keyakinan

bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak tercapai secara simultan (Pruitt & Rubin, 2004), Sehingga konflik SDA merupakan persoalan komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Komunikasi para pihak yang terlibat konflik memfasilitasi penyelesaian konflik sumber daya alam. Konflik menjadi nyata (*manifest*) bergantung proses komunikasi dalam membangun identitas anggota dan kolektifitas kelompok dalam grup konflik (Kriesberg 2011).

Tipe-tipe konflik berdasarkan hubungan sasaran dan perilaku serta implikasinya terhadap konflik terdiri dari konflik laten, konflik di permukaan (*emerging*) dan konflik terbuka (*manifest*). Klasifikasi tipe-tipe konflik dan karakteristiknya bertujuan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan intervensi komunikasi dalam penyelesaian konflik. Konflik laten bersifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif (Fisher *et al.* 2001, Miall 1998). Konflik laten sulit dideteksi karena proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi intrapersonal. Manajemen dan penyelesaian konflik dilakukan secara aktif berdasarkan deteksi dini konflik laten dan melakukan tindakan untuk

mengarahkan isu-isu konflik. Identifikasi awal dan keluhan secara interpersonal dalam konflik laten sebagai artikulasi ketidaksepakatan menghalangi pendekatan konstruktif untuk penyelesaian konflik dan menyebabkan eskalasi lebih cepat ketika konflik menjadi aktif (Prenzel dan Vanclay 2014).

Konflik di permukaan (*emerging*) memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi. Pada level individu, komunikasi dilakukan antarpersonal antara individu yang tidak sejalan atau berbeda persepsi. Komunikasi yang tidak efektif adalah potensi konflik, yaitu tidak tercapainya kesamaan makna dan tujuan. Perbedaan persepsi menjadi syarat utama terjadi konflik (Pruit dan Rubin 2004, Putnam 2013).

Konflik terjadi secara bertahap dan dengan variasi situasi. Tahapan konflik terdiri dari (1) prakonflik, ketika terdapat ketidaksesuaian sasaran dan tersembunyi dari pandangan umum, tetapi salah satu pihak mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi dan menghindari komunikasi; (2) konfrontasi, para partisipan konflik terpolarisasi dalam kelompok konflik,

mengalami ketegangan hubungan dan melakukan tindakan konfrontatif/kekerasan; (3) krisis, ketika ketegangan/kekerasan terjadi paling hebat, saluran komunikasi kemungkinan telah tertutup dan komunikasi yang muncul cenderung menyerang pihak lain; (4) akibat, ketika tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan menurun karena kemungkinan penyelesaian konflik akibat satu pihak kalah/ bernegosiasi atas prakarsa otoritas yang berkuasa; (5) pascakonflik, akhir konflik dan hubungan mengarah normal, seringkali kembali menjadi situasi pra konflik (Fisher *et al.* 2001).

Penelitian tentang konflik SDA dari perspektif komunikasi pembangunan perlu dilakukan untuk menghasilkan model komunikasi dalam pengelolaan konflik sumber daya alam sebagai intervensi solusi konflik terhadap pihak-pihak terkait pada awal konflik atau pada saat konflik terwujud nyata. Berdasarkan latar belakang dan *state of the art* tentang komunikasi dan konflik pembangunan PLTPB di Kabupaten Serang di atas maka masalah penelitian ini berfokus pada: (1) bagaimana tahapan dan tipologi konflik pembangunan PLTPB di Kabupaten Serang tercipta ? (2) bagaimana model

komunikasi pihak-pihak yang terlibat konflik dalam mengelola konflik pembangunan geotermal di Kabupaten Serang.

METODE PENELITIAN

Mengacu kepada tujuan penelitian untuk membangun model komunikasi dalam manajemen konflik SDA pembangunan PLTB di Kabupaten Serang. Penelitian didesain dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dari Yin (2014). Metode studi kasus dilakukan untuk memahami gejala sosial tanpa menghilangkan konteks dalam melakukan analisis komunikasi dalam konflik masyarakat Padarincang yang menolak proyek geothermal. Penelitian memfokuskan kepada tahapan dan tipologi konflik serta persepsi pihak-pihak yang berkonflik kemudian melatarbelakangi komunikasi di antara pihak-pihak tersebut yang berimplikasi kepada fenomena konflik. Penelitian dilakukan di desa-desa pada Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pemilihan desa berdasarkan letak geografis yang berada di daerah lokasi pembangunan PLTB, desa-desa berpotensi terdampak dan desa-desa tetangga terdampak pembangunan PLTB

di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi berpartisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pengamatan berpartisipatif serta adakalanya dilakukan peneliti dengan melibatkan wawancara yang bersifat ringan didalamnya dan menggunakan dokumen data untuk mendukung atas pengamatan tersebut sebagaimana dianjurkan Mulyana (2002). Wawancara mendalam dilakukan peneliti secara khusus berdasarkan kebutuhan data lapangan (Kuswarno 2009). Informan penelitian adalah aktor atau pemimpin opini di masyarakat yang terlibat dalam aksi penolakan proyek geothermal di Kecamatan Padarincang meliputi tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, penggiat Syarekat Perjuangan Rakyat (LSM lokal) dan penggiat LSM Lingkungan yang terlibat konflik. Studi dokumentasi dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen pemerintah/non, literasi buku/jurnal dan informasi media massa yang relevan.

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan model interaktif (Miles *et al.* 2014). Model interaktif dilakukan berdasarkan tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data penelitian diverifikasi berdasarkan teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh pada waktu dan dengan alat yang berbeda (Moeleong 2004).

PEMBAHASAN

Tahapan dan Tipologi Konflik Pembangunan PLTPB di Kabupaten Serang

Komunikasi yang tertutup antara pemangku kepentingan dalam proyek energi panas bumi (geotermal) di Gunung Prakasak Desa Wangun Kecamatan Padarincang di Kabupaten Serang melahirkan konflik antara PT. SBG selaku pengembang proyek dan masyarakat lokal meliputi masyarakat yang berprofesi petani, santri dan tokoh agama di Kecamatan Padarincang. Lokasi Gunung Prakasak sebagai Gunung Purba yang termasuk dalam wilayah Kewedanaan Rawa Danau meliputi empat kecamatan selain Padarincang yaitu Ciomas, Pabuaran dan Cinangka mendorong keterlibatan masyarakat terlibat dalam konflik sejak tahun 2017.

Komunikasi yang tertutup PT. SBG mendorong masyarakat lokal untuk mencari informasi kepada pemerintah

daerah dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi sehingga melibatkan pemerintah daerah dalam konflik antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan pemilik izin eksplorasi geotermal. Isu tentang ancaman proyek geotermal yang berdampak kepada kerusakan/bencana lingkungan yang tidak berimbang di ruang publik pada media massa lokal/nasional mendorong masyarakat sipil meliputi organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan seperti Walhi Jakarta, TrenAsia dan lain-lain ikut serta dalam pengembangan dinamika konflik lingkungan proyek geotermal.

Konflik proyek geotermal berdasarkan tipologi konflik Satria (2009) merupakan konflik lingkungan yaitu konflik yang tercipta akibat kerusakan lingkungan yang merugikan salah satu pihak yang disebabkan salah satu pihak lainnya. Konflik antara PT. SBG dengan masyarakat lokal terjadi karena perbedaan persepsi tentang kegiatan eksplorasi geotermal. PT. SBG meyakini pengeboran geotermal bersifat aman dan ramah lingkungan karena menggunakan alat dan teknologi mutakhir (*high technology*). Sedangkan masyarakat lokal memersepsikan bahwa eksplorasi geotermal sebagai salah satu

bentuk merusak lingkungan yang berpotensi menjadi bencana untuk masyarakat sekitar. Konflik geotermal dilihat dari struktur dan partisipan yang terlibat konflik merupakan konflik vertikal pihak perusahaan dan negara (Kementerian ESDM dan pemerintah daerah) sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas atas sumber daya energi panas bumi dan masyarakat lokal yang tidak memiliki kekuasaan/otoritas.

Divergensi kepentingan yang setidaknya dalam persepsi perbedaan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat konflik merupakan akibat dari tidak tercapainya konvergensi komunikasi karena proses komunikasi yang terjalin bersifat tertutup. Konflik lingkungan proyek geotermal dengan aktor utama pihak perusahaan dan masyarakat lokal mengacu pada definisi konflik Pruitt dan Rubin (2004) yang meletakkan pada aspek psikologis tercipta karena persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik atas pembangunan PLTPB menjadi bidang kajian komunikasi karena akar konfliknya merupakan perbedaan

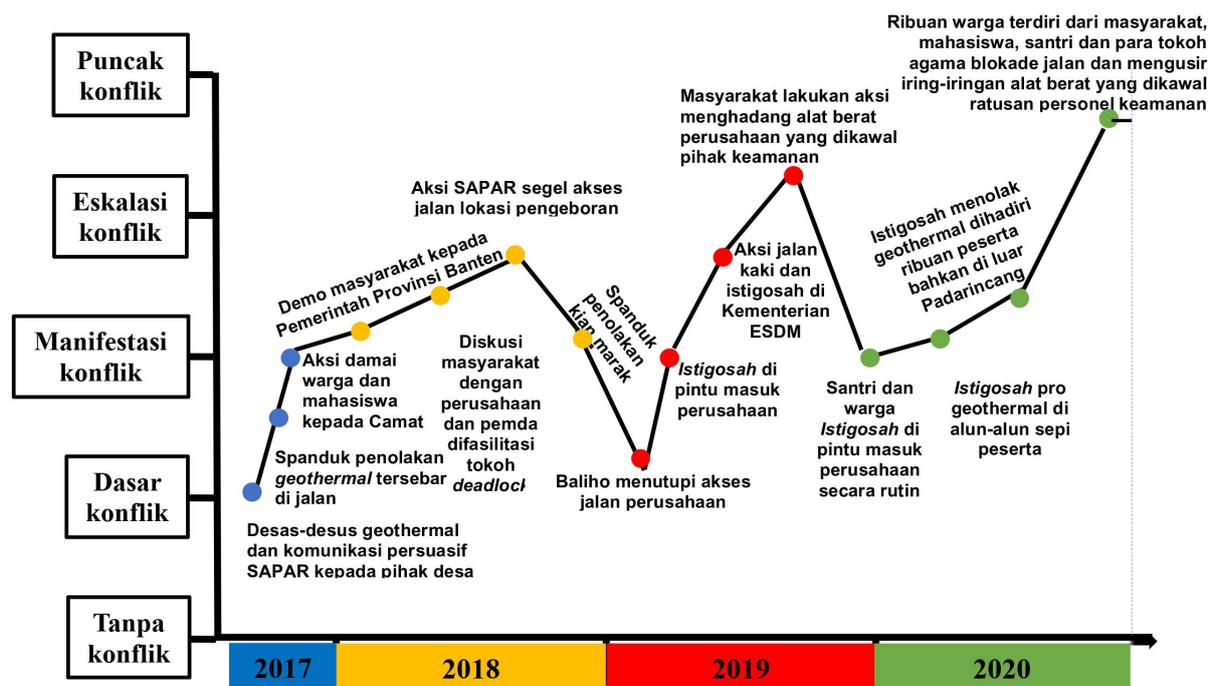
persepsi terhadap eksplorasi geotermal di Padarincang, Kabupaten Serang.

Konflik lingkungan proyek geotermal terjadi tidak secara tiba-tiba melainkan secara bertahap dengan rangkaian proses yang panjang sejak tahun 2017 sampai dengan penelitian dilakukan masih terjadi. Konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan berkembang seiring dengan relasi dan interaksi di antara keduanya. Setiap tahapan konflik yang terjadi memiliki ciri/karakteristik tersendiri. Konflik lingkungan proyek geotermal di Kabupaten Serang mengacu pada tahapan konflik Engel dan Korf (2005) yang telah dikembangkan terjadi secara bertahap dari awalnya terpendam (dasar konflik), muncul ke permukaan publik (manifestasi konflik) sampai dengan konflik yang tereskalasi tetapi belum sampai pada tahap tindakan kerusakan dan intimidasi fisik yang bersifat melanggar hak asasi manusia, *lihat* Gambar 1.

Konflik geotermal di Kabupaten Serang terjadi dari awal desas-desus geotermal di kalangan masyarakat yang melahirkan sikap pro dan kontra secara terpendam kemudian meningkat dalam bentuk aksi demonstrasi untuk menyatakan penolakannya secara terbuka di ruang publik yang terekspos dan tersiar

beragam surat kabar dan *media online* sampai dengan tindakan masyarakat secara bersama-sama untuk melakukan pengusiran/penghadangan terhadap alat-alat berat pihak perusahaan secara terbuka dan konfrontasi. Berdasarkan urutan waktu terlihat peningkatan eskalasi konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang melibatkan pihak keamanan dari

personel kepolisian dan militer yang bertugas melakukan pengamanan alat-alat berat milik perusahaan untuk kegiatan eksplorasi geotermal. Peningkatan eskalasi konflik selama babak konflik tahun 2017-2020 seiring dengan berkurangnya kegiatan komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat lokal, *lihat Gambar 1.*



Gambar 1. Tipologi dan tahap konflik PLTPB di Kabupaten Serang

Sumber : Penelitian

Konflik antara PT. SBG dengan kelompok masyarakat Padarincang dan kecamatan-kecamatan di lingkungan daerah Kawedanan Rawa Danau yang tergabung dalam Syarikat Perjuangan Rakyat (SAPAR) belum mencapai puncak konflik karena belum terjadi konfrontasi

secara langsung yang membuat satu pihak kalah dan lainnya menang. Pada kasus pengusiran dan penghadangan alat-alat berat terakhir pada bulan November tahun 2020 yang memosisikan *vis a vis* antara ribuan masyarakat lokal dengan pihak

keamanan yang diketahui berkendaraan mobil kompi militer akhirnya pihak keamanan mengalah dan menghindari kontak fisik terhadap masyarakat yang telah menghadang jalan utama menuju lokasi perusahaan.

Berdasarkan tipologi dan tahapan konflik yang disajikan, *lihat* Gambar 1 bahwa diduga konflik geotermal ke depan semakin tereskalasi dan mencapai puncaknya dengan satu pihak menang dan pihak lainnya kalah karena konfrontasi yang terjadi secara terbuka. Pihak perusahaan di satu sisi memiliki otoritas/kekuasaan karena mengantongi izin eksplorasi geotermal di Gunung Prakasak, Padarincang, Kabupaten Serang sehingga mendapatkan dukungan hukum dan tim keamanan khususnya dari pihak kepolisian. Sedangkan pihak masyarakat lokal memiliki dukungan tokoh agama dan santri semakin lama semakin banyak jumlahnya dan dukungan kelompok masyarakat sipil dan elemen lainnya serta berbagai aksi demonstrasi telah mendapatkan perhatian publik

secara nasional, yang dilihat dari aspek pertarungan wacana opini publik bersifat dominan.

Pihak-pihak yang terlibat konflik atas pembangunan PLTPB teridentifikasi setelah manifestasi konflik melalui polarisasi kelompok dan peningkatan perbedaannya dalam wacana publik media massa, *lihat* Gambar 2. Peta konflik geotermal di Kabupaten Serang terbagi dalam dua kutub kelompok yaitu kelompok yang pro pembangunan PLTPB dan kelompok kontra pembangunan PLTPB. Kelompok yang pro pembangunan PLTPB meliputi perusahaan PT. SBG, negara terdiri dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan kementerian, pihak keamanan meliputi kepolisian dan militer serta kelompok jawara. Sedangkan kelompok yang kontra pembangunan PLTPB adalah masyarakat lokal (kecamatan Padarincang dan kecamatan sekitarnya), tokoh agama, santri, kelompok mahasiswa, dan kelompok LSM lingkungan.

No	Pihak-pihak yang terlibat	Santri	Tokoh Agama	Jawara	Pemerintah Desa/Kec/Kab	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Pusat (ESDM)	Perusahaan	Pihak Keamanan	LSM Lokal	LSM Lingkungan (nasional)	Organisasi Mahasiswa
1	Santri		+	-	-	-	-	-	-	+	+	+
2	Tokoh Agama	+		-	-	-	-	-	-	+	+	+
3	Jawara	-	-		+	+	+	+	+	-	-	-
4	Pemerintah Desa/Kec/Kab	-	-	+		+	+	+	+	-	-	-
5	Pemerintah Provinsi	-	-	+	+		+	+	+	-	-	-
6	Pemerintah Pusat (ESDM)	-	-	+	+	+		+	+	-	-	-
7	Perusahaan	-	-	+	+	+	+		+	-	-	-
8	Pihak Keamanan	-	-	+	+	+	+	+		-	-	-
9	LSM lokal	+	+	-	-	-	-	-	-		+	+
10	LSM Lingkungan (nasional)	+	+	-	-	-	-	-	-	+		+
11	Organisasi Mahasiswa	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	

Keterangan: (+) Kerja sama dan (-) Konflik

Gambar 2. Relasi pihak-pihak yang terlibat konflik geotermal di Kabupaten Serang
Sumber : Penelitian

Peta pihak-pihak yang berkonflik pada pembangunan PLTPB di Kabupaten Serang mengacu kepada relasi sosial Soekanto dan Mulyawati (2017), lihat Gambar 2 terjaln dalam bentuk relasi kerja sama dan konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik cenderung menjalin relasi kerja sama dengan kelompok lainnya yang satu kubu. Sebaliknya kelompok yang berbeda kubu memiliki relasi konflik dengan kelompok/pihak lain yang berseberangan. Artinya pihak yang pro pembangunan PLTPB akan berkonflik dengan pihak kontra pembangunan PLTPB. Masing-masing kelompok akan bekerja sama dengan kelompok lainnya yang sepihak (pro dan kontra). Perbedaan/kesamaan persepsi terhadap kepentingan pembangunan

PLTPB memicu lahirnya kelompok dan pihak-pihak serta relasi dan interaksinya atas pembangunan PLTPB.

Model Komunikasi Perusahaan dan Masyarakat dalam Mengelola Konflik PLTB di Kabupaten Serang

Pendekatan komunikasi PT. SBG yang tertutup melahirkan kesenjangan informasi antara pihak perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat. Kesenjangan informasi berdampak kepada terciptanya perbedaan persepsi terhadap kepentingan pembangunan PLTPB di Kabupaten Serang. Komunikasi yang tidak efektif melahirkan perbedaan persepsi antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat terhadap proyek geotermal. Perbedaan persepsi di antara

keduanya mendasari lahirnya konflik lingkungan proyek geotermal di Kabupaten Serang. Sejalan dengan Putnam (2013) menjelaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif antar

pemangku kepentingan berpotensi konflik dan perbedaan persepsi menjadi syarat utama terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), diilustrasikan pada Tabel 1.

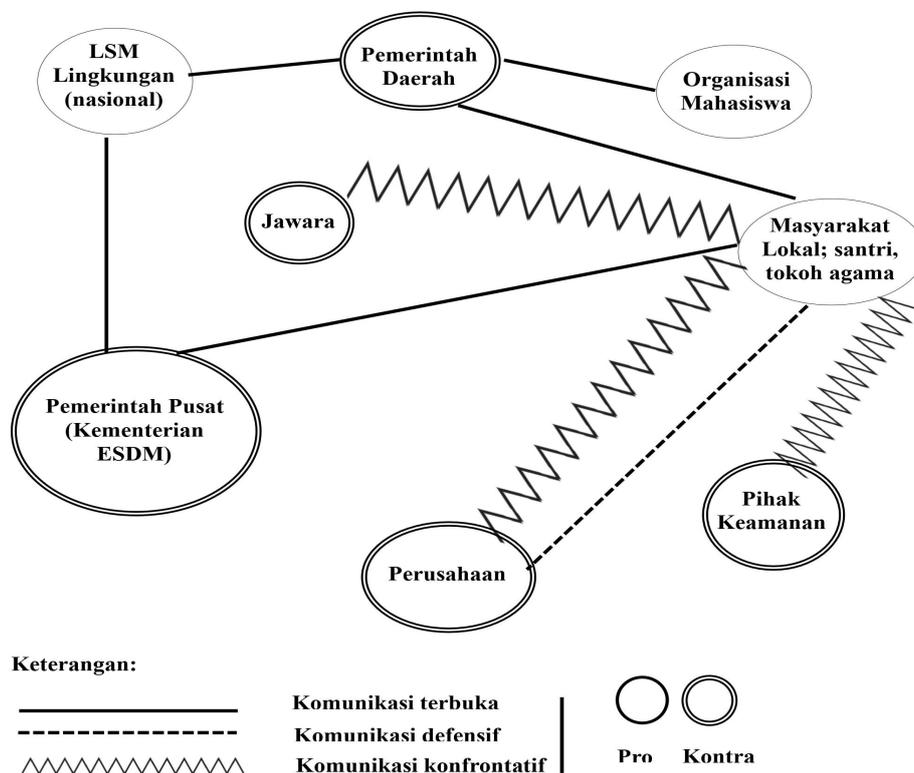
Tabel 1. Perbedaan persepsi pihak perusahaan dan masyarakat lokal

Keterangan	Pihak Perusahaan	Masyarakat Lokal
Proyek Geotermal	Geotermal merupakan program pemerintah pusat sehingga harus diikuti oleh semua pihak	PT. SBG tidak mengantongi izin secara lengkap tapi sudah mulai eksplorasi
Pemanfaatan geotermal	Potensi energi panas bumi di Gunung Prakasak bermanfaat untuk pasokan listrik nasional khususnya Pulau Jawa-Bali	Pengambilan geotermal melalui pengeboran dianggap eksploitasi manusia yang akan berujung kepada kerusakan lingkungan dan bencana sesuai surat Ar Ruum 41
Teknik <i>fracking</i> pada pengeboran geotermal dan jaraknya dengan pemukiman penduduk	Menggunakan teknologi tinggi sehingga aman untuk dilakukan	Tidak ada jaminan berhasil dan berisiko gagal maka bila terjadi masyarakat lokal akan kehilangan kehidupannya
Pengalaman pengeboran geotermal di Indonesia	Pengeboran geotermal sukses di Kamojang, Kabupaten Bandung	Lumpur Lapindo menjadi bencana lingkungan di Sidoarjo karena kegagalan pengeboran
Fenomena banjir di bawah Gunung Prakasak	Banjir terjadi karena banyaknya debit air yang diakibatkan hujan yang berlangsung lama	Tidak pernah banjir tetapi setelah menjadi lokasi geotermal terjadi banjir karena penggundulan lahan di atas gunung Prakasak
Petani mengalami kekeringan	Geotermal tidak akan menghabiskan mata air di sekitar wilayah pegunungan karena terdistribusi secara baik peruntukannya	Proses menghasilkan energi alternatif panas bumi membutuhkan banyak air sehingga menyebabkan kekeringan padahal wilayah tersebut wilayah pertanian
Keharusan pihak perusahaan mendapatkan persetujuan masyarakat	Tidak ada izin melibatkan masyarakat karena bukan kegiatan pertambangan, milik Perhutani dan lokasinya jauh dari wilayah permukiman	Masyarakat akan dirugikan bila gagal karena lokasinya berdekatan dengan pemukiman sedangkan perusahaan bila gagal tinggal pergi kapan saja

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Ketika saluran komunikasi tertutup dengan pihak perusahaan maka masyarakat kontra pembangunan yang terdiri dari tokoh agama, santri dan masyarakat lokal terdampak proyek geotermal cenderung berkomunikasi terbuka melalui berbagai aksi damai dengan pemerintah daerah ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta Kementerian ESDM untuk mendapatkan informasi seputar geotermal dan menyatakan pandangan

dan sikapnya secara terbuka di awal babak konflik. Selama proses aksi damai ke berbagai instansi pemerintah proses komunikasi bersifat akomodatif karena pemerintah daerah bukanlah pihak yang berwenang memberikan izin eksplorasi geotermal. Kendatipun aksi damai dilakukan di Kementerian ESDM proses aksi berjalan damai karena komunikasi pihak ESDM cenderung akomodatif terhadap pandangan masyarakat, lihat Gambar 3.



Gambar 3. Model komunikasi pihak-pihak yang terlibat konflik Geothermal di Kab. Serang

Sumber : Penelitian

Masyarakat kontra proyek secara defensif kepada pihak geotermal cenderung berkomunikasi perusahaan. Model komunikasi

masyarakat lokal dan pihak perusahaan yang bersifat defensif terlihat ketika proses dialog terbuka antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang difasilitasi salah satu tokoh agama di Padarincang. Komunikasi defensif adalah proses komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik yang mengalami ketegangan hubungan dan cenderung menyerang lawan komunikasi serta konfrontasi (Kaye 1998). Salah satu ciri komunikasi masyarakat dan pihak perusahaan secara defensif berdasarkan Gibb (1961) yaitu komunikasi kedua belah pihak yang bertujuan mengubah lawan komunikasinya selama proses dialog untuk mengikuti kehendak masing-masing dan melihat pendapatnya masing-masing sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Masyarakat berpegang teguh kepada tafsir surat Ar Ruum ayat 41 dan pihak perusahaan berpegang teguh kepada hasil riset tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

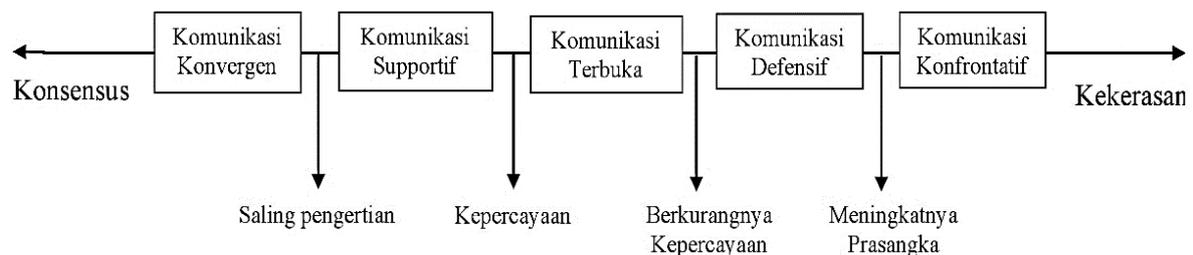
Konflik selalu berubah mengikuti interaksi sosial. Konflik adalah relasi sosial antar aktor sosial yang diwarnai dengan pertentangan dan kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing (Kinseng 2013).

Komunikasi antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan yang tidak mencapai titik temu dan solusi yang menghadirkan *win-win solution* mendorong pihak perusahaan melakukan proses eksplorasi pengeboran geotermal melalui memasukkan alat-alat berat untuk kegiatan eksplorasi pengeboran geotermal. Masyarakat lokal yang mengetahui hal tersebut merasa marah karena urusan pihak perusahaan yang belum usai dan mencapai kesepakatan. Kemarahan masyarakat lokal mendorong proses komunikasi masyarakat menjadi konfrontasi dengan pihak perusahaan dalam bentuk aksi mengusir alat-alat berat dan berkembang sampai dengan menghadang barikade iring-iringan kendaraan personel militer yang mengawal alat-alat berat ke lokasi pengeboran.

Komunikasi konfrontatif adalah ekspresi kemarahan dalam bentuk perkataan, sikap dan tindakan secara terbuka yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental dan sosial yang dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya. Sejak saat itu masyarakat lokal menutup komunikasi dengan berbagai pihak dan tidak lagi memperjuangkan aspirasi dan pandangannya terkait proyek geotermal ke berbagai instansi

pemerintah dan pihak perusahaan. Masyarakat lokal melainkan melakukan aksi penyegelan dan pemblokiran jalan menghalau pihak perusahaan secara konfrontatif. Hal ini sejalan dengan Adejimola (2009) bahwa tertutupnya komunikasi untuk dialog meningkatkan

eskalasi dan menyebabkan kekerasan (Susan 2009). Komunikasi konfrontatif berdampak kepada konflik yang lebih luas karena banyak pihak-pihak yang terlibat dan terpengaruh konflik, *lihat* Gambar 4.



Gambar 4. Model Arah komunikasi pihak yang terlibat konflik Geothermal di Kab. Serang

Sumber : Penelitian

Interaksi komunikasi pihak-pihak yang terlibat konflik secara tidak efektif pada kasus geothermal mendasari peningkatan kedalaman konflik antar pihak. Model komunikasi masyarakat lokal dengan pihak perusahaan pada proses konflik geothermal memperlihatkan proses komunikasi yang semakin mengarah kepada berkurangnya kepercayaan, meningkatnya prasangka dan berorientasi pada tindakan kekerasan satu sama lain, *lihat* Gambar 4. Peningkatan kedalaman konflik terlihat dari model komunikasi yang sebelumnya terbuka menjadi defensif dan konfrontatif.

Konflik adalah akibat dari pertentangan kepentingan, posisi dan hubungan lingkungan dan sosial yang berkembang menjadi aksi-reaksi kedua belah pihak. Pola relasi konflik dan model komunikasi yang berkembang sampai dengan konfrontatif antara masyarakat dengan pihak perusahaan menurut DeFleur *et al.* (2014) salah satunya dipengaruhi interaksi komunikasi pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini terjadi karena pendekatan konflik lingkungan proyek geothermal antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan pada pembangunan PLTPB di Kabupaten Serang merupakan pendekatan kompetisi bukan kolaborasi. Menurut

Sumardjo (2015) pendekatan kompetisi adalah penyelesaian konflik yang bersifat saling mengalahkan pihak lain (*win-lose orientation*) dan sebaliknya pendekatan kolaborasi bersifat memuaskan kedua belah pihak yang berdasarkan pemecahan masalah dan integrasi pihak-pihak yang berkonflik.

SIMPULAN

Kesimpulan

1. Konflik pembangunan PLTPB di Kabupaten Serang merupakan konflik lingkungan, terkategori konflik vertikal yang telah terjadi sejak tahun 2017 - 2021 di antara pihak yang pro pembangunan PLTPB yaitu PT. SBG dan instansi negara meliputi pemerintah daerah dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi serta kementerian ESDM Republik Indonesia dengan pihak kontra pembangunan PLTPB yaitu masyarakat meliputi masyarakat terdampak, santri, tokoh agama, kelompok masyarakat sipil meliputi mahasiswa dan lembaga sosial masyarakat dengan tipologi konflik yang terwujud nyata yang telah sampai pada tahap eskalasi konflik.
2. Model komunikasi yang terbangun di antara pihak-pihak yang berkonflik terjadi dalam bentuk terbuka,

defensif dan konfrontatif yang mengarah pada pola relasi konflik kekerasan terjadi karena pendekatan pengelolaan konflik yang bersifat kompetisi dari pada kolaborasi yang menekankan kepada pendekatan *win lose orientation* dari pada pendekatan *problem solving* dalam pemecahan masalah yang menjadi dasar konfliknya meliputi perbedaan persepsi kepentingan terhadap pembangunan PLTPB di Kabupaten Serang.

Saran

1. Pihak-pihak yang terlibat konflik khususnya pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan komunikasi dalam pengelolaan konflik PLTPB di Kabupaten Serang yang mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemecahan masalah secara terbuka, konstruktif dan orientasi solusi untuk kedua belah pihak yang bersifat akomodatif kedua belah pihak serta mengurangi keluhan-keluhan masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan pada saat pembukaan lahan, proses pengeboran dan pasca pengeboran geotermal dengan memperhatikan tanggung jawab sosial kepada

masyarakat terdampak yang mendorong pemberdayaan masyarakat secara jangka pendek dan jangka panjang.

Model komunikasi yang bersifat dialogis antara pihak-pihak yang terlibat konflik, melibatkan semua pihak yang pro dan kontra pembangunan PLTPB secara langsung ataupun menggunakan mediator tokoh agama yang diterima masyarakat lokal terdampak dengan arah komunikasi yang bersifat dua arah, mendorong konsensus dan membuka ruang dialog secara interaktif secara bertahap dan berjenjang dengan menjunjung kesetaraan partisipasi komunikasi yang terlibat dan empati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adejimola AS. 2009. Language and communication in conflict resolution. *J Law and Confl Resol.* 1(1): 001-009.
- DeFleur MH, Kearney P, Plax TG, DeFleur ML. 2014. *Fundamentals of Human Communication: Social Science in Everyday Life*, Fourth Edition. New York (NY): McGraw-Hill Companies, Inc.
- Dixon, A. B., & Wood, A. P. (2007). *Local institutions for wetland management in Ethiopia: sustainability and state intervention*. In B. van Koppen, Giordano M, Butterworth J, editor. Wallingford(UK): CABI International.
- Engel A, Korf B. 2005. *Negotiation and mediation techniques for natural resource management*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
- Fisher S, Abdi DI, Ludin J, Smith R, Williams S, William S. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Alih Bahasa oleh S.N. Kartikasari dkk. Zed Books, The British Council.
- Gibb, JR. 1961. Defensive Communication . *Journal of Comm.* 11: 141-148.
- Kaye M. 1998. *Communication Management*. Sydney(AUS): Prentice Hall Australia.
- Kinseng RA. 2013. Identifikasi potensi, analisis dan resolusi konflik. Di dalam: Nikijuluw VPH, Adrianto L, Januarini N, editor. *Coral Governance*. Bogor (ID): IPB Pr. hlm 335-372
- Kriesberg L. 2011. *Constructive conflict: from escalation to resolution*. 4th

- Edition. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publisher, Inc.
- Kuswarno, E. 2009. *Fenomenologi : Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Marques AS, Ramos TB, Caeiro S, Costa MH. 2011. Adaptive-participative sustainability indicators in Marine Protected Areas : Design and communication. *Ocean and Coastal Management*, (72): 36-45. doi: 10.1016/j.ocecoaman.2011.07.007.
- Miall H, Woodhouse T, Ramsbotham O. 1998. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta(ID): Rajagrafindo Persada.
- Miles MB, Huberman M, Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed ke-3. California (US): Sage Publ.
- Moeleong, LJ. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prenzel PV, Vanclay F. 2014. How social impact assesment can contribute to conflict management. *Env Imp Ass Rev*. 45:30-37.
- Pruitt DG, Rubin JZ. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta (ID) : Pustaka Pelajar
- Putnam, LL. 2013. Definitions and approaches to conflict. In: Oetzel JG, Ting-Toomey S, editors. *The SAGE Handbook of Conflict Communication: Integrating Theory, Research, and Practice, "2nd ed"*. London (GB): SAGE Publ, Inc.
- Satria, A. 2009. *Ekologi politik nelayan*. Yogyakarta: LkiS
- Sumardjo. 2006. Komunikasi dalam perspektif ekologi manusia. Di dalam: Adiwibowo S, editor. *Ekologi Manusia*. Bogor(ID): FEMA IPB.
- Sumardjo. 2015. Pemberdayaan: Alternatif perluasan strategi deradikalisasi. Makalah utama disampaikan dalam *seminar nasional*; 2015 Okt 13; Bogor, Indonesia. Bogor(ID): IICC.
- Soekanto S dan Sulistyowati B. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Susan JT, Wim HJM. 2007. Empathy and conflict resolution in friendship relations among adolescents. *Aggress Behav.* 33:48–55. doi: 10.1002/ab.20166.
- Yin RK. 2014. *Case Study Research: Design and Methods*. Ed ke-5. California (US): Sage Publ, Inc.
- WB. 2014. *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia*. Jakarta (ID): The World Bank.